

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI
5 PROVINSI PULAU JAWA TAHUN 2018 – 2023**



Oleh

Nama : Faris Salman Mayzi
NIM : 21313153
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2025

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 5 PROVINSI
PULAU JAWA TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

Disusun dan diujikan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1

Program studi ekonomi pembangunan

Fakultas bisnis dan ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Faris Salman Mayzi

NIM : 21313153

Program studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti maksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ternyata pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

Yogyakarta, 18 April 2025

Penulis



Faris Salman Mayzi

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN
PENDAPATAN DI 5 PROVINSI PULAU JAWA TAHUN 2018-2023**

Disusun oleh : FARIS SALMAN MAYZI

Nomor Mahasiswa : 21313153

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 12 Juni 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

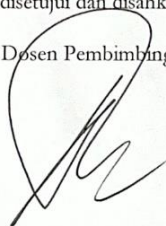
PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI 5 PROVINSI
PULAU JAWA TAHUN 2018-2023

Nama : Faris Salman Mayzi
Nim : 21313153
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 18 April 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

 acc on the
yic

Suharto, S.E., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan selama proses pengerjaan skripsi hingga akhirnya dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk ayah dan ibu penulis yang telah memberikan dukungan tiada henti serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk diri sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sampai proses pengerjaan skripsi selesai dengan baik.
3. Kepada dosen pembimbing yang telah mendampingi dan mengarahkan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir
4. Untuk seluruh dosen FBE UII yang telah mengamalkan ilmu yang bermanfaat selama proses studi sehingga proses studi berjalan dengan baik

“I am the only thing i can control. I am inimitable, I am an original”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama, penulis ucapkan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Upah minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023’ yang disusun sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata 1 program studi ekonomi pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepada sebaik baik nabi penutup dan pilihan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih sangat banyak kekurangan. Tak lupa penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk melewati segala proses hingga saat ini dan menyelesaikan kewajiban tugas akhir. Ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan, karunia serta hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi selama proses studi dan pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Suharto, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
4. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa proses perkuliahan
5. Sahabat – sahabat Cijoy yaitu Ahmad Zikrillah, Muhammad Ramdani Nasution dan Raihan Maulana Zidan telah memberikan bantuan, motivasi, dan semangat serta kebersamaan penulis selama proses perkuliahan

6. Teruntuk Ailsa Namira Hani yang senantiasa menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi
7. Teman – teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan
8. Untuk diri penulis sendiri yang tidak lupa akan amanah serta tanggung jawabnya di Yogyakarta sehingga mampu melalui semua proses perkuliahan dan sampai pada penyelesaian tugas akhir.

Dengan kesadaran penulis akan banyaknya kekurangan dalam penulisan penelitian ini, maka perlu adanya kritik serta saran yang dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan yang membangun, baik untuk penulis ataupun penulis karya – karya ilmiah selanjutnya. Besar harapan penulis untuk penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik untuk diri penulis sendiri ataupun semua pihak seta menjadi referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 18 April 2025

Penulis,



Faris Salman Mayzi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	1
BAB I.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
Sumber: Badan Pusat Statistika	4
Table 1. 3 Data Upah Minimum Provinsi di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Rp) Tahun 2018-2023	6
Table 1. 4 Data Produk Domestik Regional Bruto di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Miliar) Tahun 2018-2023.....	8
1.2 Rumusan masalah.....	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan.....	17
2.2.2 Upah Minimum Provinsi (UMP).....	18
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	18
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	18
2.2.5 Jumlah penduduk	19
2.3 Hubungan Antar Variabel	20
2.3.1 Hubungan antara UMP Dengan Ketimpangan Pendapatan	20
2.3.2 Hubungan Antara PDRB Dengan Ketimpangan Pendapatan	21
2.3.3 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dengan Ketimpangan Pendapatan.....	21
2.3.4 Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Ketimpangan Pendapatan	22
2.3.5 Hubungan Antara Covid-19 Dengan Ketimpangan Pendapatan	22
2.4 Hipotesis Penelitian.....	23
2.5 Kerangka Pemikiran	24
BAB III.....	25
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.2 Metode dan Pengumpulan Data.....	25
3.2.1 Metode Analisis	26
3.3 Metode Pengelolaan Data.....	26
3.3.1 Common Effect:.....	26
3.3.2 Fixed Effect:.....	27
3.3.3 Random Effect:.....	27
3.4 Uji Pemilihan Model.....	27
3.4.1 Uji F / Chow Test (Uji Common Effect vs Uji Fixed Effect).....	27

3.4.2 Uji Hausman (Uji Fixed Effect vs Uji Random Effect)	27
3.5 Uji Statistik	28
3.5.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)	28
3.5.2 Uji F (simultan)	28
3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T).....	28
BAB IV	30
4.1 Deskripsi Data Penelitian	30
4.2 Pemilihan Model Regresi	30
4.2.1 Uji Chow	30
4.3 Model Regresi Terbaik	31
4.4 Uji Statistik	32
4.4.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)	32
4.4.2 Uji F	32
4.4.3 Uji T	32
4.5 Analisis Ekonomi.....	33
4.5.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan	33
4.5.2 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan pendapatan	34
4.5.3 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan ...	34
4.5.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan	35
4.5.5 Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	36
BAB V	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Implikasi	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2 kurva Lorenz	17
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (%) tahun 2018-2023	3
Table 1. 2 Perbandingan Provinsi DIY dengan provinsi lain	4
Table 1. 3 Data Upah Minimum Provinsi di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Rp) Tahun 2018-2023.....	6
Table 1. 4 Data Produk Domestik Regional Bruto di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Miliar) Tahun 2018-2023	8
Table 1. 5 Data Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (%) Tahun 2018-2023.....	9
Table 1. 6 Data Jumlah Penduduk di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Juta) Tahun 2018-2023	11

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Tabel Data Penelitian.....	42
LAMPIRAN II Common Effect Model.....	44
LAMPIRAN III Fixed Effect Model.....	45
LAMPIRAN IV Hasil Uji Chow	46
LAMPIRAN V Cross Tabel Effect.....	47

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di lima provinsi Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, selama periode 2018 hingga 2023. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut dan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berkontribusi menurunkan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sementara pertumbuhan PDRB dan IPM juga berperan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan secara signifikan. Selain itu, jumlah penduduk memberikan dampak yang bervariasi tergantung karakteristik ekonomi masing-masing provinsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan pendapatan akibat peningkatan pengangguran dan penurunan pendapatan pekerja di sektor formal dan informal. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pemerintah dalam merumuskan strategi pengendalian ketimpangan pendapatan melalui penyesuaian upah minimum dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah Pulau Jawa.

Kata kunci: UMP, PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Ketimpangan Pendapatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Levin-Waldman dan Whalen (2007) Upah minimum adalah kebijakan yang bermanfaat untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang wajar dan mencegah kemiskinan dengan memastikan bahwa pekerja memenuhi standar kebutuhan hidup mereka. Pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah juga akan mengurangi dispersi upah dan melalui efek multiplier, mungkin meningkatkan permintaan umum. Upah minimum sangat penting untuk penetapan upah nasional di banyak negara. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah secara umum, tetapi mereka juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan, dan berdampak besar pada dispersi upah keseluruhan. Kebijakan upah minimum ditujukan kepada mereka yang bekerja di sektor formal. Karena peraturan tersebut, mereka tidak akan menerima gaji di bawah upah minimum. Untuk menghindari denda, perusahaan harus mematuhi peraturan. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya alat untuk melindungi pekerja di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi "isu-kelas menengah" (Sungkar et al., 2015)

Dalam penelitian Sukma, (2021). Ketimpangan didefinisikan sebagai perbedaan yang ada pada satu orang maupun pada satu kelompok yang lainnya. Dalam hal ini ketimpangan pendapatan dapat diartikan dengan kondisi individu yang memiliki pendapatan tinggi dan individu yang berpendapatan rendah memiliki kesenjangan. Dalam suatu rumah tangga ketimpangan pendapatan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam suatu keluarga tersebut. Ketimpangan pendapatan pada seseorang dalam suatu kelompok akan menjadikan orang tersebut berada pada keadaan atau kondisi yang dianggap kurang layak dan dianggap miskin. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan menjadikan suatu individu di masyarakat menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehingga mengakibatkan kemiskinan. Akibatnya, angka kemiskinan semakin naik.

Perekonomian dapat dikatakan berkembang dan meningkat ketika aktivitas ekonominya berkembang pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di bidang pendidikan juga merupakan faktor penting dalam menentukan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara, terutama di Indonesia, di mana banyak pengangguran terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya kapasitas pendidikan untuk memenuhi persyaratan penerimaan karyawan. Ketimpangan pendapatan menjadi masalah penting di Indonesia, di mana sebagian besar pendapatan tertumpu pada segmen ekonomi yang sempit. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis tentang pengaruh komponen-komponen tersebut di Indonesia untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran berhubungan dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

Menurut penelitian Aisyah et al., (2023) Mengatasi ketimpangan pendapatan adalah salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan umum melalui pengembangan ekonomi adalah tujuan utama setiap negara di seluruh dunia. Jika suatu negara mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan, negara tersebut dapat dianggap mencapai pembangunan ekonomi yang sukses. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara merata dan tanpa menyimpang, terutama dalam hal pendapatan, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Termasuk negara berkembang, Indonesia seharusnya dapat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan memiliki efek jangka panjang.

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2018	0,394	0,367	0,405	0,357	0,371
2019	0,394	0,361	0,398	0,358	0,364
2020	0,399	0,365	0,398	0,359	0,364
2021	0,409	0,363	0,406	0,368	0,364
2022	0,423	0,377	0,412	0,366	0,365
2023	0,431	0,368	0,425	0,369	0,387

Table 1. 1 Data Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (%) tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan data di atas, perkembangan suatu indeks atau rasio di lima provinsi yang diteliti, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, selama periode 2018 hingga 2023. Secara umum, DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami tren peningkatan, di mana DKI Jakarta mengalami kenaikan dari 0,394 pada tahun 2018 menjadi 0,431 pada tahun 2023, sedangkan Jawa Barat meningkat dari 0,405 menjadi 0,425 pada periode yang sama. Sementara itu, Banten cenderung stabil atau sedikit menurun, dari 0,367 pada tahun 2018 menjadi 0,368 pada tahun 2023. Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menunjukkan pergerakan yang relatif stabil, dengan nilai berkisar antara 0,371 hingga 0,390 untuk Jawa Tengah dan 0,357 hingga 0,415 untuk Jawa Timur. Data dari BPS ini juga menggambarkan peningkatan ketimpangan pendapatan akibat pandemi Covid-19. BPS menyatakan angka ketimpangan pendapatan di 5 Provinsi di atas serentak mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19, hal ini dikarenakan banyaknya pekerja yang terdampak PHK akibat pandemi Covid-19 yang membuat para pekerja terdampak tidak memiliki penghasilan dan distribusi pendapatan semakin timpang.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak disertakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan metodologis dan teknis yang bertujuan untuk menjaga validitas dan efisiensi model penelitian. Skala ekonomi DIY relatif kecil jika dibandingkan dengan lima provinsi lainnya di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur, baik dari segi Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun jumlah penduduk. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam analisis jika dimasukkan ke dalam model panel data yang menggabungkan provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi yang jauh lebih besar. DIY juga memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang cukup unik, terutama dengan dominasi sektor pendidikan dan pariwisata, yang dapat menyebabkan perbedaan pola ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih industrial. Terakhir, untuk menjaga efisiensi model regresi panel yang digunakan, jumlah unit *cross-section* dibatasi pada lima provinsi utama dengan kontribusi ekonomi terbesar. Oleh karena itu, pemilihan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagai objek penelitian dianggap paling relevan untuk mencapai tujuan analisis yang diharapkan.

Tahun	Provinsi	PDRB	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)
2023	DKI Jakarta	2.050.456,97	10.640,0	660,98
2023	Banten	511.804.653,01	12.167,0	9.352,77
2023	Jawa Barat	1.669.416,85	49.306,8	37.044,86
2023	Jawa Tengah	1.102.563.177,18	37.180,4	34.337,49
2023	Jawa Timur	1,844.808,70	41.230,0	48.036,84
2023	DI Yogyakarta	277.001,00	4.073,9	3.170,65

Table 1. 2 Perbandingan Provinsi DIY dengan provinsi lain

Sumber: Badan Pusat Statistika

Menurut Adelman dan Moris (1973) dalam bukunya Lincoln Arsyad (2010: 283-284) Menjelaskan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang dapat modal; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya

nilai-nilai tukar; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. (Afifah, 2018)

Upah Minimum Provinsi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian (Anshari et al., 2018) upah minimum secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, upah minimum mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di mana upah meningkat maka angka ketimpangan akan turun, ketika upah meningkat berarti kemampuan daya beli masyarakat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sedangkan dalam penelitian Menurut penelitian dari Volscho (2005), hubungan antara upah minimum dan ketimpangan pendapatan ditemukan nonlinear yang artinya upah minimum negara tidak efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan. Perbedaan pengaruh yang diberikan upah minimum terhadap ketimpangan ini bisa disebabkan karena bentuk penerapan kebijakan yang kurang berhati-hati. Dalam penerapan kebijakan upah minimum, jika upah yang ditetapkan terlalu tinggi, dapat menyebabkan terjadinya *trade off employment*, selain itu kepatuhan terhadap kebijakan upah yang ditetapkan juga perlu menjadi perhatian untuk melihat apakah kebijakan upah tersebut dapat mengurangi ketimpangan atau justru memperburuk ketimpangan yang terjadi.

Penelitian mengenai pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan sudah banyak dilakukan, penelitian Chum dan Khor (2010) melihat pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan dengan mengestimasi dampak pada pendapatan kelompok-kelompok upah yang berbeda dengan data tahun 1993 dan 2007. Metode Ordinary Least Square (OLS) yang digunakan dalam penelitian tersebut memungkinkan hanya melihat perbedaan rata-rata antar kelompok upah sehingga untuk melihat ketimpangan pendapatan sebaiknya dilihat juga perilaku distribusinya menggunakan metode Kernel Density Estimation. Dalam penelitian tersebut, Chum dan Khor (2010) melihat dampak upah minimum pada distribusi upah, tetapi tidak melihat

bahwa employment juga dapat mempengaruhi distribusi upah. Selain itu, Chum dan Khor (2010) dalam menganalisa ketimpangan pendapatan tidak menggunakan konsep dentitas upah kontrafaktual sehingga hasilnya memungkinkan terjadi bias.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk melakukan fungsi yang mensejahterakan rakyat, yang dasar atau kewenangannya diatur dan bersumber dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bebas dan mengikat karena negara ini adalah negara hukum. Digunakannya asas kebebasan dan intervensi pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan bermasyarakat adalah hasil dari penerapan asas negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dilema yang muncul adalah jika konsekuensi tersebut tidak dilakukan, fungsi administrasi akan terhambat dan kesejahteraan masyarakat akan ikut terhambat.

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2018	3.648.036	2.099.385	1.544.361	1.486.065	1.508.895
2019	3.940.973	2.267.990	1.668.373	1.605.396	1.630.590
2020	4.276.350	2.460.997	1.810.351	1.742.015	1.768.777
2021	4.416.186	2.460.996	1.810.351	1.941.082	1.868.777
2022	4.641.854	2.501.203	1.841.487	1.812.953	1.891.567
2023	4.901.798	2.661.280	1.986.670	1.958.270	2.040.244

Table 1. 3 Data Upah Minimum Provinsi di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Rp) Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika

Data di atas menunjukkan perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di lima provinsi yang diteliti, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dari tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, semua provinsi mengalami kenaikan UMP setiap tahunnya, meskipun dengan besaran yang berbeda. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi di antara kelima

provinsi, dengan nilai meningkat dari Rp3.648.036 pada tahun 2018 menjadi Rp4.901.798 pada tahun 2023. Banten dan Jawa Barat juga menunjukkan tren peningkatan, dari masing-masing Rp2.099.385 dan Rp1.544.361 pada tahun 2018 menjadi Rp2.661.280 dan Rp1.986.670 pada tahun 2023. Sementara itu, Jawa Tengah yang memiliki UMP terendah di awal periode, yaitu Rp1.486.065 pada tahun 2018, mengalami kenaikan hingga Rp1.958.270 pada tahun 2023. Jawa Timur juga menunjukkan tren serupa, dari Rp1.508.895 pada tahun 2018 menjadi Rp2.040.244 pada tahun 2023. Kenaikan UMP ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan upah pekerja dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan antar provinsi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perangkat data ini dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), dan penetapan pajak, kajian. Menurut teori ekonomi makro, PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama. Badan Pusat Statistika (2018).

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Perubahan dalam PDRB, baik peningkatan maupun penurunan, dapat menunjukkan perubahan dalam produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. PDRB mencerminkan pendapatan yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Semakin

tinggi PDRB suatu wilayah, semakin besar pendapatan yang diperoleh wilayah tersebut, sehingga tingkat PDRB yang tinggi bisa mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat diamati melalui peningkatan PDRB tanpa memperhatikan besarnya peningkatan tersebut Sukirno, (2011).

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/daerah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Perekonomian yang ideal adalah suatu perekonomian yang terus menerus tumbuh tanpa satu tahun bahkan satu triwulan pun mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2018	1.735.208,29	436.581.428,06	1.419.624,14	941.091.143,86	1.563.441,80
2019	1.836.240,55	459.666.415,79	1.490.959,69	991.516.543,31	1.649.895,60
2020	1.792.291,09	444.265.085,76	1.453.380,72	965.227.269,21	1.611.392,60
2021	1.856.000,69	463.472.925,94	1.507.746,39	997.321.131,34	1.668.754,40
2022	1.953.488,99	487.676.067,09	1.589.984,93	1.050.278.091,92	1.757.874,90
2023	2.050.465,97	511.804.653,01	1.669.416,85	1.102.563.177,18	1.844.808,70

Table 1. 4 Data Produk Domestik Regional Bruto di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Miliar) Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika

Masalah lain di pulau Jawa adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (BPS, 2022). IPM mencakup tiga

komponen utama: harapan hidup yang panjang, akses yang merata ke pendidikan, dan standar hidup yang layak. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan dapat menjadi komponen penting dalam memahami distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat. Selain itu, peningkatan IPM juga dapat memiliki dampak jangka panjang yang lebih luas dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Sumber daya manusia dan pemberdayaan individu yang lebih baik memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maldini, (2024). yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi yang berada di Pulau Jawa pada periode tahun 2014-2020. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa, sedangkan kemiskinan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2018	80,47	71,95	71,3	71,12	70,77
2019	80,76	72,44	72,03	71,73	71,5
2020	80,77	72,45	72,09	71,87	71,71
2021	81,11	72,72	72,45	72,16	72,14
2022	81,65	73,32	73,12	72,79	72,75
2023	82,46	73,87	73,74	73,39	73,38

Table 1. 5 Data Indeks Pembangunan Manusia di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (%) Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika

Data yang disajikan menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi yang diteliti di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dari tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, semua provinsi mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya, mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi

dibandingkan provinsi lainnya, meningkat dari 80,47 pada tahun 2018 menjadi 82,46 pada tahun 2023. Banten dan Jawa Barat juga mengalami peningkatan signifikan, masing-masing dari 71,95 dan 71,3 pada tahun 2018 menjadi 73,87 dan 73,74 pada tahun 2023. Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang memiliki angka IPM lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di awal periode, juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan kenaikan dari 71,12 dan 70,77 pada tahun 2018 menjadi 73,39 dan 73,38 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap provinsi, meskipun terdapat perbedaan laju pertumbuhan di masing-masing wilayah.

Apabila jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah diikuti dengan produktivitas penduduk daerah yang tinggi tidak akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga ikut berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain. Seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin meningkat, urbanisasi dan lain sebagainya. Pola penyebaran penduduk yang tidak seimbang dan mobilitas tenaga kerja yang tidak seimbang baik antar pulau maupun antar daerah mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia.

Menurut Matondang, (2018) Masalah jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini sangat berhubungan dengan penyediaan tenaga kerja, perencanaan pembangunan dan pertahanan. Setiap negara ingin mengetahui jumlah penduduknya berdasarkan tiga alasan, yaitu politik dan keamanan, sosial, dan ekonomi. Kelebihan penduduk biasanya tidak berarti selalu banyak orang untuk suatu daerah, tetapi kelebihan dalam hubungan dengan kebutuhan dan fasilitas kehidupan. Jumlah penduduk yang

terlalu tinggi akan menimbulkan beraneka macam masalah seperti pemukiman, keamanan, kesehatan, pengangguran, dan pangan. Jumlah penduduk yang rendah akan menimbulkan kekurangan tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang sehingga terdapat *under employment*.

Tahun	DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
2018	10.428,0	12.530,8	48.475,5	34.358,5	39.521,9
2019	10.504,1	12.714,3	49.023,2	34.552,5	39.744,8
2020	10.684,9	12.431,4	50.345,2	37.892,3	41.814,5
2021	10.562,1	11.904,6	48.274,2	36.516,0	40.665,7
2022	10.605,4	12.023,0	48.738,8	36.811,1	40.921,1
2023	10.640,0	12.167,0	49.306,8	37.180,4	41.230,0

Table 1. 6 Data Jumlah Penduduk di 5 Provinsi Pulau Jawa Dalam (Juta) Tahun 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistika

Data yang disajikan menunjukkan jumlah penduduk di lima provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dari tahun 2018 hingga 2023. Secara umum, seluruh provinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan yang berbeda. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, meningkat dari 48,47 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 49,31 juta jiwa pada tahun 2023. Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki jumlah penduduk yang besar, masing-masing meningkat dari 39,52 juta dan 34,35 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 41,23 juta dan 37,18 juta jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, Banten mengalami penurunan dari 12,53 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 12,17 juta jiwa pada tahun 2023. DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil dibandingkan provinsi lain, bertambah dari 10,42 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 10,64 juta jiwa pada tahun 2023. Perkembangan ini mencerminkan tren pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi, dan dinamika sosial-ekonomi di masing-masing provinsi.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023?
5. Bagaimana pengaruh Covid-19 (DUMMY) terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023
2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023
4. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023
5. Menganalisis pengaruh Covid-19 (DUMMY) terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2019-2021

Adapun manfaat penelitian:

1. Sebagai bahan literasi bagi pembaca yang tertarik terhadap fenomena Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa
2. Sebagai acuan sekaligus pembandingan hasil-hasil penelitian dengan topik sama yang sudah ada sebelumnya

3. Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa
4. Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa
5. Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa
6. Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa
7. Memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh pandemi Covid-19 terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

1. Studi oleh Sungkar et al., (2015) meneliti upaya untuk menunjukkan hubungan dan pengaruh upah minimum terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan Autoregressive. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan yang positif, yang artinya peningkatan upah minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan.
2. Sungkar et al., (2015) melakukan penelitian terhadap upah minimum dengan ketimpangan pendapatan, didapatkan hasil penelitian bahwa perubahan upah minimum memiliki efek positif pada nilai ketimpangan pendapatan di periode 1999-2003 di Indonesia. Kenaikan upah minimum diikuti oleh relatif perubahan kecil dalam Rasio Gini yang berarti bahwa kondisi pendapatan di Indonesia menjadi lebih tidak merata. Pengaruh upah minimum pada analisis ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa upah minimum telah menjadi alat yang tidak efisien. Selain itu, kenaikan upah minimum disertai dengan penurunan probabilitas kerja di sektor formal.
3. Wiryawan dan Prastiwi, (2024). Meneliti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi yang ada di Indonesia.
4. Soesatyo dan Anggoro (2023) Meneliti tentang Pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pengangguran di Kota Surabaya dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi dan ekspansi angkatan kerja. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat kausal. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran Kota Surabaya, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
5. Zulfa, (2024). Meneliti tentang pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), upah minimum kabupaten (UMK), pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2012-2022. Temuannya menunjukkan bahwa

rasio produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pariwisata dan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sedangkan upah minimum kabupaten (UMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali dan angka harapan hidup (AHH) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

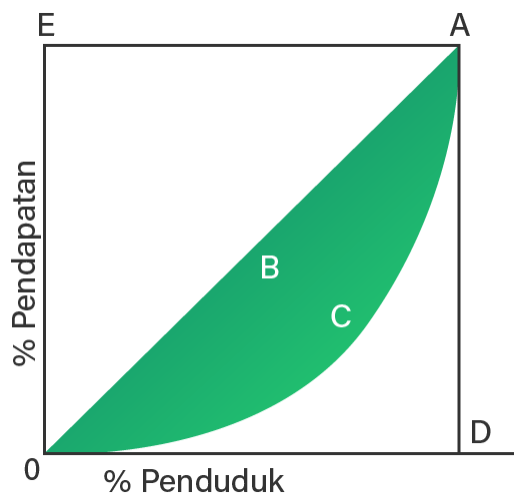
6. Widyastuti dan Indrawati (2021) Meneliti tentang pengaruh pendidikan, upah minimum kota/kabupaten (UMK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. Penulis menggunakan metode analisis regresi data panel. Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t, pendidikan dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan uji f, pendidikan, upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.
7. Menurut Sungkar et al., (2015) Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, variabel produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Menurut Raziq dan El Hasanah (2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh PDB Sektor Pertanian, PDB Sektor Industri, PDB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal dan Kredit Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, dengan menggunakan regresi data panel. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini salah satunya adalah ditemukan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan pengaruh negatif, kecuali variabel PDB Sektor Industri. Sedangkan elastisitasnya, masing-masing variabel bebas bersifat inelastis terhadap ketimpangan pendapatan.

9. Menurut Kusuma et al., (2019) Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah masalah bagi semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat PDRB, inflasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2017. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah yang terlibat pada tahun 2011-2017. Data yang digunakan berupa data PDRB, inflasi, IPM dan indeks gini dari tahun 2011-2017. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program Eviews 9. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial PDRB, inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama PDRB, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan D.I Yogyakarta.
10. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Hasmarini (2023) adalah untuk menganalisis arah dan besarnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel periode 2015-2022 di Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrik (estimator). Model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model REM (*random effect model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali pada periode 2015-2022 dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, upah minimum kabupaten, dan jumlah penduduk.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menurut Anshari et al., (2018) diartikan sebagai perbedaan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh tiap individu dalam suatu daerah yang sama. Ketimpangan pendapatan yang terjadi pada suatu daerah ini antara lain disebabkan oleh ketimpangan peluang, tingginya konsentrasi kekayaan, pekerjaan yang tidak merata dan ketahanan ekonomi yang rendah (World Bank, 2016).



Gambar 2. 1 kurva Lorenz

Dalam penelitian Riani et al., (2019), Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar, dengan sisi vertikalnya menunjukkan persentase pendapatan nasional kumulatif dan sisi horizontalnya menunjukkan persentase penduduk kumulatif. Kurva berada di diagonal utama bujur sangkar. Jika kurva Lorenz lebih dekat dengan sumbu diagonal, yang berarti lebih lurus, itu menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang lebih merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz lebih jauh dari sumbu diagonal, yang berarti lebih lengkung, itu menunjukkan situasi yang lebih buruk, yaitu distribusi pendapatan nasional semakin tidak merata dan timpang.

2.2.2 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menurut Yanda et al., (2022) teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu. Upah adalah sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan /organisasi kepada para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam Teori Permintaan Efektif yang dikemukakan oleh Jhon Maynard Keynes, bahwa peningkatan upah akan meningkatkan daya beli pekerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi. Jika upah yang didapatkan terlalu rendah, daya beli masyarakat akan melemah, yang dapat memperburuk ketimpangan pendapatan karena hanya kelompok kaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Amelia et al., (2024). PDRB suatu wilayah atau provinsi adalah total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi. Nilai produksi (output) dikurangi biaya antara adalah definisi dari nilai tambah bruto. Komponen nilai tambah bruto adalah pajak tidak langsung neto, penyusutan, dan komponen faktor pendapatan (bunga, pendapatan, sewa tanah, upah dan gaji. Dalam Teori pertumbuhan dan Ketimpangan yang dikemukakan Simon Kuznets menunjukkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan meningkat karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan retsibusi, ketimpangan pendapatan akan mulai menurun.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Penelitian Firdaus dan Hasmarini, (2023). Menemukan bahwa hanya ada satu variabel yang signifikan menyebabkan ketimpangan pendapatan yaitu variabel IPM.

Hal ini berarti tinggi rendahnya IPM mempunyai pengaruh pada tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan. Dalam Teori Modal Manusia yang dikemukakan Gary S. Becker, bahwa investasi dalam modal manusia (pendidikan dan keterampilan) sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga pembangunan manusia yang merata dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi

2.2.5 Jumlah penduduk

Menurut Firdaus dan Hasmarini, (2023). Apabila jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah diikuti dengan produktivitas penduduk daerah yang tinggi tidak akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam Teori Pertumbuhan Penduduk dan Ketimpangan yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk bersifat eksponensial. Jika jumlah penduduk bertambah tanpa diikuti peningkatan produksi, maka ketimpangan pendapatan akan meningkat. Karena semakin banyak kelompok miskin yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2.2.5 Covid-19

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak akhir tahun 2019 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, pandemi ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi distribusi pendapatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dampak pandemi tidak hanya menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan tingkat pengangguran, menurunkan daya beli masyarakat, dan memperluas kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Menurut Bank Dunia (2020), pandemi Covid-19 memicu krisis ekonomi global yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan. Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus turut membatasi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor informal

yang banyak dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan kelompok masyarakat tersebut mengalami penurunan pendapatan yang drastis, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi cenderung memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil, bahkan dapat bertahan melalui sistem kerja jarak jauh (*work from home*). Secara teori, ketimpangan pendapatan dapat diperburuk oleh krisis ekonomi dalam teori pembangunan. Kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan infrastruktur kesehatan yang memadai akan lebih terdampak oleh guncangan ekonomi. Dalam hal ini, pandemi menjadi faktor eksternal yang memperbesar ketimpangan pendapatan karena distribusi dampaknya yang tidak merata antar kelompok sosial dan wilayah geografis.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara UMP Dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut Sungkar et al., (2015) teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah minimum menyebabkan, non-pasar, berperan menentukan batas minimum upah di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Upah minimum yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan tenaga kerja, menyebabkan beberapa pekerja pengangguran. Namun, para ekonom institusional berpendapat bahwa upah minimum menurunkan ketimpangan. Upah minimum mengubah distribusi pendapatan dengan menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah. Dengan demikian, standar upah akan naik dan distribusi pendapatan dan upah akan lebih adil.

Secara empiris, beberapa studi telah secara eksplisit mencoba meneliti efek dari upah minimum terhadap ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, Islam dan Nazara (2000) mengambil pendekatan tidak langsung untuk mengklaim bahwa upah minimum di Indonesia bukanlah kebijakan yang buruk dari segi profitabilitas perusahaan. Bahkan setelah mengontrol komponen endogenitas upah minimum, mereka menemukan bahwa kebijakan upah minimum tidak mengurangi profitabilitas perusahaan. Menurut

Cun dan Khor (2010), perubahan yang dilakukan pada undang-undang upah minimum merupakan komponen penting dan signifikan yang membantu mengurangi disparitas upah antara kelas atas dan kelas bawah distribusi pendapatan dan upah di Indonesia. Volscho (2005) melakukan penelitian sebelumnya dengan data negara bagian selama sepuluh tahun (1960-2000) untuk menguji hipotesis bahwa negara dengan upah minimum yang lebih tinggi memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah dan negara dengan upah minimum yang lebih rendah memiliki level ketimpangan pendapatan keluarga yang lebih rendah.

2.3.2 Hubungan Antara PDRB Dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam teorinya, Kuznets (1955) berpendapat bahwa ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hubungan yang signifikan ini dipengaruhi oleh jangka waktu. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara negatif dalam jangka pendek, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi naik, ketimpangan pendapatan akan meningkat. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi naik, ketimpangan pendapatan meningkat. Teori William (1966) juga menyetujui pendapat bahwa kurva ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan penduduk berbentuk huruf U yang terbalik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pada awalnya, pembangunan akan berfokus di wilayah pusat yang cenderung lebih maju, menyebabkan ketimpangan yang tinggi karena pembangunan tidak dilakukan secara menyeluruh. Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan akan menyebar ke wilayah lain, menurunkan ketimpangan pendapatan. (Arum, 2023)

2.3.3 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian yang dilakukan Safrinja et al., (2025) Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan ketimpangan pendapatan dapat dikatakan kompleks. IPM mengukur kualitas hidup penduduk melalui indikator seperti

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Peningkatan IPM mencerminkan tingkat produktivitas penduduk yang tinggi, di mana pendidikan dan keterampilan yang lebih baik membuka peluang pekerjaan yang lebih layak, sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas. Selain itu, IPM juga mengukur pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kualitas hidup, di mana perbedaan IPM antar daerah dapat menjadi faktor penyebab ketimpangan pendapatan.

2.3.4 Hubungan Antara Jumlah Penduduk Dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam Penelitian yang dilakukan Raziq dan El Hasanah, (2023) bahwa Hubungan antara jumlah penduduk dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil yang bervariasi dalam berbagai penelitian. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Misalnya, penelitian di Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, meskipun pendidikan dan kemiskinan memiliki dampak yang lebih besar.

2.3.5 Hubungan Antara Covid-19 Dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian Al Araafi et al., (2024) Fenomena ketimpangan sosial dan ekonomi dalam dampak pandemi COVID-19 sangat terlihat. Pandemi ini telah memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Dalam konteks kesehatan, terdapat ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi kesehatan yang memadai lebih rentan terhadap dampak negatif COVID-19 (Stok et al., 2021). Selain itu, pandemi juga dapat memperburuk keadaan kesehatan sebelumnya, seperti penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, pada orang-orang yang paling rentan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi secara keseluruhan, tetapi dampak yang dihasilkannya tidak selalu merata.

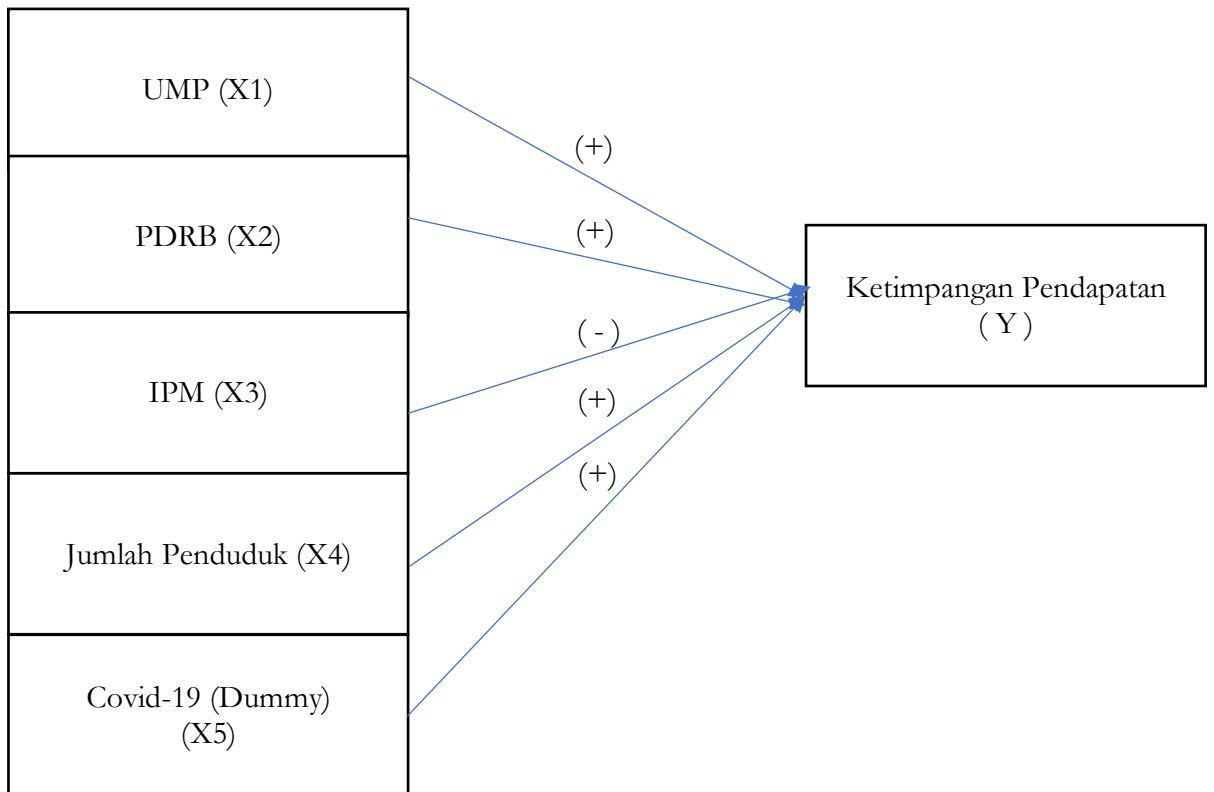
Ekonomi lebih berdampak pada orang-orang yang berpenghasilan rendah atau bekerja di sektor informal. Mereka mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Aisyah, 2023). Sebaliknya, negara-negara yang memiliki kekayaan yang lebih besar mungkin memiliki kemampuan yang lebih besar untuk bertahan dan bahkan memanfaatkan peluang bisnis yang muncul selama pandemi. Ketimpangan sosial juga melibatkan akses terhadap vaksin COVID-19.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kumpulan dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Model hipotesis ini menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun hipotesis dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Diduga UMP berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
2. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
3. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
4. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
5. Diduga pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

2.5 Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dan telah diproses dari pihak lain (sudah tersedia) dalam bentuk yang sudah diolah dan sudah dipublikasikan oleh pihak lain. Data panel juga digunakan dalam penelitian ini (gabungan dari *time series* dan *cross section*) dari tahun 2018-2023 pada 5 Provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistika. Data yang diperoleh meliputi

1. Data mengenai Ketimpangan Pendapatan (%) yang didapat dari Badan Pusat Statistika tahun 2018-2023
2. Data mengenai Upah Minimum Provinsi (Juta) yang didapat dari Badan Pusat Statistika tahun 2018-2023
3. Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (Miliar) yang didapat dari Badan Pusat Statistika tahun 2018-2023
4. Data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (%) yang didapat dari Badan Pusat Statistika tahun 2018-2023
5. Data mengenai Jumlah Penduduk (Juta) yang didapat dari Badan Pusat Statistika tahun 2018-2023

3.2 Metode dan Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Periode data dalam penelitian ini adalah tahun 2018-2023. Sebagai pendukung dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari penelitian skripsi sebelumnya, jurnal-jurnal, buku-buku, dan menggunakan internet selain dari data sekunder.

3.2.1 Metode Analisis

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai Model estimasi. Data panel merupakan metode regresi yang menggabungkan data time series dan cross section, menurut Widarjono, (2007). Memiliki beberapa keuntungan dengan menggunakan metode regresi data panel, yakni mampu memberikan data yang lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* lebih besar serta dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi penghilangan variabel. Ada tiga metode dalam melakukan regresi panel data diantaranya adalah *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Model persamaan data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* adalah sebagai berikut:

$$y = \beta_0 + X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + E_{it}$$

Keterangan:

i = Banyaknya unit observasi

t = Banyaknya waktu

Y = Ketimpangan Pendapatan

X_1 = Upah Minimum Provinsi (%)

X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar)

X_3 = Indeks Pembangunan Manusia (%)

X_4 = Jumlah Penduduk (Juta)

X_5 = Pandemi Covid-19 (DUMMY)

E_{it} = Error

3.3 Metode Pengelolaan Data

Untuk melakukan estimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering digunakan, yaitu:

3.3.1 Common Effect:

Metode Common Effect menggabungkan data time series dan cross-section, dan metode OLS dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel. Metode ini tidak mengutamakan aspek individu atau waktu. Perilaku data antar perusahaan dianggap identik sepanjang waktu.

3.3.2 Fixed Effect:

Salah satu Teknik yang menggunakan variabel dummy untuk melihat perbedaan intersep adalah dengan metode fixed effect. Pendekatan ini membuat asumsi bahwa meskipun intersep tidak tergantung pada waktu, koefisien regresi, atau kemiringannya, stabil di seluruh bisnis dan waktu.

3.3.3 Random Effect:

Metode Random Effect menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin muncul pada hubungan antar waktu dan kabupaten/kota. Metode OLS tidak dapat menghasilkan estimator yang efektif, sehingga metode Generalized Least Square (GLS) adalah pilihan yang lebih baik. Setelah tiga metode tersebut ditemukan estimasi model regresinya, pengujian harus dilakukan untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk digunakan dalam regresi data panel. Tiga uji yang dilakukan adalah:

3.4 Uji Pemilihan Model

3.4.1 Uji F / Chow Test (Uji Common Effect vs Uji Fixed Effect)

Uji F yaitu uji yang membandingkan dua regresi dan digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel menggunakan metode fixed effect lebih baik daripada menggunakan model common effect. Cara mengetahui mana yang lebih baik dapat melihat sum of squared residuals (Widarjono, 2007).

3.4.2 Uji Hausman (Uji Fixed Effect vs Uji Random Effect)

Setelah dilakukan pengujian dengan menentukan mana model terbaik antara metode OLS dengan Fixed Effect dan metode OLS dengan Random Effect telah ditentukan dan jika hasilnya kedua uji tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan metode OLS, maka perlu dilakukan langkah selanjutnya. Salah satunya dengan cara melihat apakah ada korelasi antara error term dan variabel independen X, jika dibuktikan saling berhubungan maka model random effect menjadi model terbaik, begitu juga sebaliknya. Dengan statistik uji hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka dapat disimpulkan hasilnya menolak hipotesis nol, sehingga model fixed effect menjadi model terbaik dan berlaku sebaliknya. (Widarjono, 2007).

3.5 Uji Statistik

3.5.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Uji determinasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independent secara Bersama sama mempengaruhi variabel dependen, yang dilihat dari nilai adjusted R – Squared. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol sampai satu. Semakin tinggi nilai dari koefisien determinasi, maka variabel independen lebih dapat menjelaskan variabel dependen.

3.5.2 Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau hanya untuk mengukur pengaruh total dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi F di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, atau sebaliknya. Hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, yang artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.5.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji T ini digunakan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independent secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai P-Value lebih kecil dari α (5%) maka terdapat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Namun, jika nilai P-value lebih besar dari α (5%) maka tidak ada pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Hipotesis uji T dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan

$H_0: \beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh variabel Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Ha: $\beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh variabel Upah Minium Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan

2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Ketimpangan Pendapatan

H0: $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto i terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

Ha: $\beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

H0: $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

Ha: $\beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

4. Variabel Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

H0: $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

Ha: $\beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pengumpulan data yang diperoleh pada penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistika DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Tahun 2018-2023. Peneliti memilih data panel sebagai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, di mana data panel merupakan gabungan antara cross section dan time series. Data cross section yang telah dihimpun serta diperoleh dari Badan Pusat Statistika. Sedangkan untuk data time series peneliti menggunakan empat variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap satu variabel.

4.2 Pemilihan Model Regresi

Sistematis dalam proses analisis menggunakan model regresi data panel, maka harus dilakukan dua pengujian untuk memilih model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdapt dua tahap pengujian yang perlu dilakukan, yaitu uji *common effect* dan uji *fixed effect*. Berikut hasil dari pengujian nya.

4.2.1 Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian dengan melakukan perbandingan antara dua regresi serta digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel menggunakan model fixed effect lebih baik disbanding menggunakan model common effect.

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Effects test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.587755	(4,20)	0.0000
Cross-section chi-square	61.304912	4	0.0000

Berdasarkan dari hasil pengujian di atas, diperoleh nilai probabilitas dari Cross Section Chi Square sebesar $0,0000 < 0,05$ atau lebih kecil dari α (5%) sehingga hasil

dari uji chow adalah menerima H_a yang artinya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

4.3 Model Regresi Terbaik

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model terbaik dihasilkan model Fixed Effect sebagai model regresi terbaik.

Tabel 4. 2 Tabel Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob.
C	2.565984	2.762701	0.928795	0.3641
LOG(UMP)	0.277832	0.080689	3.443251	0.0026
LOG(PDRB)	0.479749	0.218381	2.196841	0.0400
LOG(IPM)	-3.692302	1.473852	2.505206	0.0210
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	0.028286	0.136672	0.206966	0.8381
COVID-19 (DUMMY)	-0.026198	0.0066716	-3.900855	0.0009
R-squared	0.962328	Mean dependent var	-0.961653	
Adjusted R-squared	0.945375	S.D. dependent var	0.058490	
S.E of regression	0.013670	Akaike info criterion	-5.485983	
Sum squared resid	0.003738	Schwarz criterion	-5.018917	
Log likelihood	92.28975	Hannan-Quinn crite.	-5.336565	
F-statistic	56.76591	Durbin-Watson stat	1.955900	
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.4 Uji Statistik

4.4.1 Koefisien Determinasi (R-Squared)

Uji determinasi mempunyai tujuan untuk mengukur persentase dependen yang dapat dijabarkan dengan model regresi. Dari hasil estimasi yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil analisis koefisien determinasi (R-Square) dengan angka 0,962328. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UMP, PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk mampu menjelaskan variabel pengangguran sebesar 96,2% sisanya 3,8% dijelaskan variabel lain di luar model.

4.4.2 Uji F

Berdasarkan tabel hasil estimasi di atas ditemukan bahwa nilai probabilitas f statistik sebesar $0,0000 < 0,05$ lebih kecil dari pada α (5%). Dapat diartikan bahwa variabel UMP, PDRB, IPM, dan Jumlah Penduduk secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan.

4.4.3 Uji T

H_0 = variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 = variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

1. Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)

Menurut hasil analisis yang telah dilakukan di atas, ditemukan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%) yang di mana $0,0026 < 0,05$ sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa

2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut hasil analisis yang telah peneliti lakukan di atas, ditemukan bahwa probabilitas $> \alpha$ (5%) yang di mana $0,0400 < 0,05$ sehingga memiliki kesimpulan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut hasil analisis yang telah peneliti lakukan di atas, ditemukan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%) yang di mana $0,0210 < 0,05$ sehingga memiliki kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa.

4. Variabel Jumlah Penduduk

Menurut hasil analisis di atas, didapatkan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%) yang di mana $0,8381 > 0,05$ sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa.

5. Variabel Covid-19 (DUMMY)

Menurut hasil analisis di atas, didapatkan bahwa probabilitas $< \alpha$ (5%) yang di mana $0,0009 < 0,05$ sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan Ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.1 Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Upah Minimum Provinsi sebesar 0,0026 dan nilai koefisien 0,277832. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 provinsi Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika UMP mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,277832%.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sungkar et al., (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” yang menyatakan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi dalam penelitian ini secara signifikan memiliki hubungan positif, yang artinya peningkatan Upah Minimum akan menaikkan angka kesenjangan pendapatan atau memperbesar kesenjangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan peningkatan upah minimum yang tidak merata di setiap provinsi.

4.5.2 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan pendapatan

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,0400 dan nilai koefisien 0.479749. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 provinsi Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,79749%.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma et al., 2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi dan IPM terhadap ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017” yang menyatakan bahwa variabel PDRB, Inflasi, dan IPM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta.

4.5.3 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,0210 dan nilai koefisien -3.692302. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 provinsi Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan menurunkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 3,692302%.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien tertinggi dalam uji regresi sebesar -3.692302 dan nilai probabilitas 0,0210. Pengaruh signifikan dari variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia

memiliki kontribusi terbesar dalam mengurangi angka Ketimpangan Pendapatan. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia secara langsung berdampak pada penurunan angka Ketimpangan Pendapatan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lala et al., (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-kota di Provinsi Sulawesi Utara)” yang menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan Pendapatan, bahwa apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat, ketimpangan pendapatan akan menurun. Sebaliknya, jika Indeks Pembangunan Manusia menurun, ketimpangan pendapatan akan meningkat.

4.5.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Jumlah Penduduk sebesar 0,8381 dan nilai koefisien 0.028286. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 provinsi Pulau Jawa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2019) yang menyatakan hasil penelitian bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY. Karena peningkatan jumlah penduduk di Provinsi DIY belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY, peningkatan tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk memiliki beberapa pengaruh positif dan negatif, pengaruh negatif dari peningkatan jumlah penduduk di suatu daerah apabila tidak diikuti dengan peningkatan pendidikan maka akan menimbulkan masalah ketimpangan yang lain, salah satunya ketimpangan pendidikan. Pada Provinsi DIY terdapat ketimpangan pendidikan pada masing-masing

kota/kabupaten, hal tersebut menjadi latar belakang mengapa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap adanya ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY.

4.5.5 Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai probabilitas Covid-19 (DUMMY) sebesar 0,0009 dan nilai koefisien -0.026198. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di 5 provinsi Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan meningkat setelah adanya pandemi Covid-19 dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19, namun angka Ketimpangan Pendapatan menurun setelah pandemi Covid-19 selesai.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sani et al., (2022) yang memberikan hasil penelitian bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Banyak orang dari masyarakat kelas bawah bekerja di sektor informal yang membutuhkan orang untuk bekerja langsung di tempat kerja. Kebijakan ini akan berdampak pada pekerjaan mereka karena banyak orang tidak dapat melakukan konsumsi karena pendapatan mereka menurun. Di satu sisi, masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas tidak begitu terpengaruh oleh munculnya pandemi karena mereka memiliki tabungan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih besar untuk bertahan selama pandemi. Akibatnya, masyarakat ini tidak akan terpengaruh oleh konsumsi mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan penulis mengenai “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan Pendapatan Di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023. Di mana kenaikan Upah Minimum Provinsi justru diikuti dengan kenaikan angka Ketimpangan Pendapatan dikarenakan kenaikan Upah Minimum Provinsi yang tidak merata antar daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan angka Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa akan dipengaruhi oleh Upah Minimum Provinsi.
2. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023. Di mana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto justru diikuti dengan peningkatan angka Ketimpangan Pendapatan dikarenakan peningkatan PDRB cenderung hanya dinikmati oleh beberapa kalangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan angka Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa akan dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto.
3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023. Di mana semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin rendah angka Ketimpangan Pendapatan dikarenakan peningkatan sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan angka Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa akan dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia.
4. Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap angka ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023. Hal tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan atau penurunan angka Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tidak akan dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk.

5. Variabel Covid-19 (Dummy) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka ketimpangan Pendapatan di 5 Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018-2023. Di mana kenaikan angka Covid-19 diikuti dengan kenaikan angka Ketimpangan Pendapatan dikarenakan banyak sektor ekonomi yang terdampak akibat Pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan angka Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa akan dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, kenaikan UMP yang tidak merata justru dapat memperbesar jurang ketimpangan antar kelompok pendapatan. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dengan UMP, kebijakan penetapan UMP sebaiknya mempertimbangkan keselarasan antara tingkat upah dan produktivitas daerah, serta difokuskan pada peningkatan pemerataan kesempatan kerja di sektor formal. Pemerintah juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan UMP agar tidak hanya berdampak pada kelompok pekerja tertentu, tetapi juga mampu mengangkat kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah secara menyeluruh.

Penelitian ini menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengarahkan pertumbuhan PDRB ke sektor-sektor yang padat karya dan inklusif, agar manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, diperlukan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan, bukan hanya fokus pada pertumbuhan angka PDRB semata.

IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti semakin tinggi kualitas manusia, maka semakin rendah ketimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan manusia menjadi sangat penting dalam menekan ketimpangan pendapatan. Pemerintah harus terus mendorong pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan standar hidup masyarakat. Investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan juga harus diperluas agar seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun demikian, hal ini bukan berarti isu kependudukan dapat diabaikan. Pemerintah tetap perlu mengelola pertumbuhan penduduk secara seimbang dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas, pendidikan, dan kesempatan kerja tetap berpotensi menjadi sumber ketimpangan di masa depan.

Pandemi Covid-19 terbukti secara signifikan berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa banyak kelompok masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan sosial, memperluas bantuan bagi kelompok rentan, dan fokus pada pemulihan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan harus diperluas, serta sistem kesehatan dan jaminan sosial diperkuat untuk memastikan kelompok berpendapatan rendah mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menurunkan angka ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Jabodetabek Periode 2011-2016. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i12.1065>
- Al Araafi, F., Sadam, M., Nahda Tsabitah, K., & Rasya Anindya, R. (2024). Kesenjangan Sosial-Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 : Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 819–829. <https://doi.org/10.46306/Jbbe.V17i1>
- Amelia, W., Yunus, R., Sading, Y., & Lutfi, M. (2024). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2022. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6, 246–256.
- Arum, S. D. (2023). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. Universitas Islam Indonesia.
- Firdaus, A., & Hasmarini, I. M. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota Di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *Primanomics : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/Ds>
- Wiryawan, J. K., & Prastiwi, M. (2024). Pengaruh Pdrb Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan Dan Ipm Di Provinsi-Provinsi Indonesia. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(3), 198–224. <https://doi.org/10.56910/Gemawisata.V20i3.405>
- Kusuma, D., Sarfiah, N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. *Directory Journal Of Economic*, 1(3).
- Lala, A. J., Naukoko, A. T., & Dj Siwu, H. F. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Studi Pada Kota-Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 61.
- Maldini, F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat 2012-2022. Universitas Islam Indonesia.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidiempuan Hutaimbaru. 2.
- Muhammad Anshari, Zul Azhar, & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia.

- Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.20885/jkek.Vol2.Iss1.Art2>
- Riani, L. P., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2019). Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini , Kurva Lorentz , Dan Ukuran Bank Dunia. 72–83.
- Safrinja, E., Andiny, P., Mardhani, M., & Safuridar, S. (2025). Analisis Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, Volume 3(1). <https://doi.org/10.61132/jepi.V3i1.1098>
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel Di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.V6i1.499>
- Sari Nurmalisa Sungkar, Nazamuddin, & Muhammad Nasir. (2015). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. In *Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. <https://jurnal.usk.ac.id/mie/article/viewfile/4739/4088>
- Sukma, M. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019. Universitas Islam Indonesia.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Ekonisia.
- Widyastuti, & Indrawati, L. R. (2021). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 95–104. <https://doi.org/10.23960/jep.V10i2.268>
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, I. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*.
- Yoyok Soesatyo Dan Moch Heru Anggoro. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya. *Journal Of Economic And Management (Jecma)*, 5(1), 95–103. <https://doi.org/10.46772/jecma.V5i1.955>
- Zulfa. (2024). Analisis Pengaruh Pdrb, Upah Minimum, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2010 – 2022. Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN I
Tabel Data Penelitian

Kota	Tahun	Ketimpangan Pendapatan	UMP	PDRB	Jumlah Penduduk	IPM	Dummy
Jakarta	2018	0,394	3.648.036	1.735.208,29	10.428,0	80,47	0
Jakarta	2019	0,394	3.940.973	1.836.240,55	10.504,1	80,76	1
Jakarta	2020	0,399	4.276.350	1.792.291,09	10.684,9	80,77	1
Jakarta	2021	0,409	4.416.186	1.856.000,69	10.562,1	81,11	1
Jakarta	2022	0,423	4.641.854	1.953.488,99	10.605,4	81,65	0
Jakarta	2023	0,431	4.901.798	2.050.465,97	10.640,0	82,46	0
Banten	2018	0,367	2.099.385	436.581.428,06	12.530,8	71,95	0
Banten	2019	0,361	2.267.990	459.666.415,79	12.714,3	72,44	1
Banten	2020	0,365	2.460.997	444.265.085,76	12.431,4	72,45	1
Banten	2021	0,363	2.460.996	463.472.925,94	11.904,6	72,72	1
Banten	2022	0,377	2.501.203	487.676.067,09	12.023,0	73,32	0
Banten	2023	0,368	2.661.280	511.804.653,01	12.167,0	73,87	0
Jawa Barat	2018	0,405	1.544.361	1.419.624,14	48.475,5	71,3	0
Jawa Barat	2019	0,398	1.668.373	1.490.959,69	49.023,2	72,03	1
Jawa Barat	2020	0,398	1.810.351	1.453.380,72	50.345,2	72,09	1
Jawa Barat	2021	0,406	1.810.351	1.507.746,39	48.274,2	72,45	1
Jawa Barat	2022	0,412	1.841.487	1.589.984,93	48.738,8	73,12	0
Jawa Barat	2023	0,425	1.986.670	1.669.416,85	49.306,8	73,74	0
Jawa Tengah	2018	0,357	1.486.065	941.091.143,86	34.358,5	71,12	0
Jawa Tengah	2019	0,358	1.605.396	991.516.543,31	34.552,5	71,73	1

Jawa Tengah	2020	0,359	1.742.015	965.227.269,21	37.892,3	71,87	1
Jawa Tengah	2021	0,368	1.941.082	997.321.131,34	36.516,0	72,16	1
Jawa Tengah	2022	0,366	1.812.953	1.050.278.091,92	36.811,1	72,79	0
Jawa Tengah	2023	0,369	1.958.270	1.102.563.177,18	37.180,4	73,39	0
Jawa Timur	2018	0,371	1.508.895	1.563.441,80	39.521,9	70,77	0
Jawa Timur	2019	0,364	1.630.590	1.649.895,60	39.744,8	71,5	1
Jawa Timur	2020	0,364	1.768.777	1.611.392,60	41.814,5	71,71	1
Jawa Timur	2021	0,364	1.868.777	1.668.754,40	40.665,7	72,14	1
Jawa Timur	2022	0,365	1.891.567	1.757.874,90	40.921,1	72,75	0
Jawa Timur	2023	0,387	2.040.244	1.844.808,70	41.230,0	73,38	0

LAMPIRAN II

Common Effect Model

Dependent Variable: KETIMPANGAN_PENDAPATAN
Method: Panel Least Squares
Date: 04/17/25 Time: 16:02
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.472380	0.211271	2.235895	0.0349
UMP	3.55E-08	1.47E-08	2.413811	0.0238
PDRB	-1.22E-11	6.45E-12	-1.896206	0.0700
IPM	-0.002767	0.003377	-0.819560	0.4205
JUMLAH PENDUDUK	1.30E-06	3.08E-07	4.235011	0.0003
DUMMY	-0.009688	0.004395	-2.204014	0.0374
R-squared	0.782417	Mean dependent var	0.382900	
Adjusted R-squared	0.737087	S.D. dependent var	0.022762	
S.E. of regression	0.011671	Akaike info criterion	-5.886554	
Sum squared resid	0.003269	Schwarz criterion	-5.606314	
Log likelihood	94.29831	Hannan-Quinn criter.	-5.796903	
F-statistic	17.26052	Durbin-Watson stat	0.422627	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN III

Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(KETIMPANGAN_PENDAPATAN)
Method: Panel Least Squares
Date: 03/11/25 Time: 00:32
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.565984	2.762701	0.928795	0.3641
LOG(UMP)	0.277832	0.080689	3.443251	0.0026
LOG(PDRB)	0.479749	0.218381	2.196841	0.0400
LOG(IPM)	-3.692302	1.473852	-2.505206	0.0210
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	0.028286	0.136672	0.206966	0.8381
DUMMY	-0.026198	0.006716	-3.900855	0.0009

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.962328	Mean dependent var	-0.961653
Adjusted R-squared	0.945375	S.D. dependent var	0.058490
S.E. of regression	0.013670	Akaike info criterion	-5.485983
Sum squared resid	0.003738	Schwarz criterion	-5.018917
Log likelihood	92.28975	Hannan-Quinn criter.	-5.336565
F-statistic	56.76591	Durbin-Watson stat	1.955900
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN IV

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: PIX
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.587755	(4,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	61.304912	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LOG(KETIMPANGAN_PENDAPATAN)
Method: Panel Least Squares
Date: 03/11/25 Time: 00:35
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.373793	1.419381	-2.376946	0.0258
LOG(UMP)	0.211292	0.117938	1.791549	0.0858
LOG(PDRB)	-0.006618	0.002939	-2.251469	0.0338
LOG(IPM)	-0.290117	0.664720	-0.436450	0.6664
LOG(JUMLAH_PENDUDUK)	0.068638	0.029680	2.312640	0.0296
DUMMY	-0.024753	0.013122	-1.886400	0.0714
R-squared	0.709262	Mean dependent var	-0.961653	
Adjusted R-squared	0.648691	S.D. dependent var	0.058490	
S.E. of regression	0.034668	Akaike info criterion	-3.709153	
Sum squared resid	0.028845	Schwarz criterion	-3.428913	
Log likelihood	61.63729	Hannan-Quinn criter.	-3.619502	
F-statistic	11.70969	Durbin-Watson stat	0.296367	
Prob(F-statistic)	0.000008			

LAMPIRAN V
Cross Tabel Effect

	KOTA	Effect
1	Jakarta	1.476368
2	Banten	-1.845078
3	Jawa Barat	1.406748
4	Jawa Tengah	-2.281495
5	Jawa Timur	1.243457